

ISSN : 1858-4977

JIA

JURNAL ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

Volume 6

Nomor 1

April 2010

JIA

JURNAL ILMU ADMINISTRASI

Diterbitkan Oleh

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sam Ratulangi Manado

Ketua Penyunting

Prof. Dr. Patar Rumapea, M.Si

Wakil Ketua Penyunting

Drs. R. Johnly Pio, M.Si

Penyunting Pelaksana

Drs. Frendy A. O. Pelleng, M.Si

Drs. Lucky F. Tamengkel, MM

Dra. F. Daicy J. Lengkong, M.Si

Ir. Alvon Jusuf, MBA

Dewan Pakar

Prof. Dr. Umar Nimran, MA

(Guru Besar Universitas Brawijaya Malang)

Prof. Dr. J.G. Nirbito, M.Pd

(Guru Besar Universitas Negeri Malang)

Prof. Dr. Supriyanto, MM

(Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang)

Dr. Anang Kristyanto, MM

(Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya)

Drs. Agus Hermawan, M.Si, Mbus

(Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang)

Rokhedi Priyo Santoso, SE, MIDEc

(Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

Pelaksana Tata Usaha

Johana Undap

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado 95115. Gedung a Lt. II Blok Barat. Telp. (0431) 862586 Fax. (0431) 862586

(JIA) Jurnal Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado diterbitkan sejak tahun 2005.

(JIA) Jurnal Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Dekan : Drs. Johny Lumolos, M.Si. Pembantu Dekan I : Drs. M.R. Rembang, M.Si. Pembantu Dekan II : Drs. N.R. Pioh, M.Si. Pembantu Dekan III : Drs. W.A. Areros, M.Si. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi : Drs. S.M. Sumaiku, M.Si.

(JIA) Jurnal Ilmu Administrasi, terbit 3 kali dalam satu tahun pada bulan April, Agustus, dan Desember.

Dicetak oleh :

UNSRAT PRESS

Jl. Kampus Unsrat Manado 95115

Telp. 0431 - 863786 HP. 081356468558

JIA

JURNAL ILMU ADMINISTRASI

ISSN : 1858-4977

VOLUME 6

Nomor 1, April 2010

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO**

JIA
JURNAL ILMU ADMINISTRASI
 Jurusan Ilmu Administrasi
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Sam Ratulangi Manado

Volume 6, Nomor 1

April 2010

DAFTAR ISI

Pengaruh Perilaku Birokrasi Terhadap Kinerja Organisasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Pada Sekretariat Kota Manado) <i>Arie J. Rorong</i>	1 – 8
Pemberdayaan Perempuan Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Perbaikan Kondisi Sosial-Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sangihe) <i>Burhamuddin Kiyai</i>	9 – 16
Kontribusi Kebijakan Pembangunan Sosial Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Miskin Perkotaan (Suatu Studi Di Kecamatan Tuminting Kota Manado) <i>Martha Ogotan</i>	17 – 27
Analisis Hubungan Disiplin Dengan Prestasi Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara <i>Florence Daicy Jetty Lengkong, Patar Rumapea</i>	25 – 31
Peran Aktif Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Sebagai Pedagang Eceran Ikan di Kecamatan Tuminting Kota Manado (Kasus Pelelangan Ikan di Kelurahan Tumumpa) <i>Roy F. Runtuwene</i>	33 – 40
Analisis Penerimaan Pajak Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah Kota Manado <i>Sonny G. Kaparang</i>	41 – 44
Alternatif Kebijakan Penanganan Masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Manado <i>Welson Yappy Rompas</i>	45 – 51

Alternatif Kebijakan Penanganan Masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Manado

Welson Yappy Rompas

Abstract: The Existence and activities of commercial sex workers (pekerja seks komersial/ PSK) in Manado City, which had escalated a long with the mushrooming of entertainment venues, indicated the emergence of social problems, particularly the increasing number of HIV/ AIDS cases, such that there was a need for an effective handling through an appropriate policy. This research employed a descriptive method of analysis. The data sources consisted of various stakeholders, i.e. public figures, religious leaders, prominent women, bureaucrats, and politicians/ legislative members, as well as prostitutes, procurers, and managers of entertainment venues or other places where prostitutes operated. Data were collected using interviews and the collected data were then subjected to a descriptive and a prospective policy analysis method. The result showed that : Firstly, there were three alternative policy options in handling the prostitution problem in Manado City, i.e.a localization program, an economic improvement program for sex workers, and a supervision and guidance program. Secondly, the supervision and guidance program was proven to be the most effective option, while the localization program was difficult to realize because of public resistance and the economic improvement program for sex workers was not feasible because it needed an enormous amount of resources and funding. Based on the study result and policy analysis, it was concluded that the sex worker supervision and guidance program were the most suitable policy options to be adopted by the Regional Government of Manado City. It was also suggested that the Regional Government enacted a regional regulation (peraturan daerah/ PERDA) to make sure that the policy was implemented effectively.

Key word : Policy Alternative, Commercial Sex Worker.

Pelacuran atau prostitusi merupakan masalah sosial yang cukup besar pengaruhnya bagi perkembangan moral. Banyak kekhawatiran yang timbul karena adanya pelacuran ini, sebab ia tidak hanya dapat menciptakan masalah bagi keluarga dan generasi muda saja, melainkan juga kekhawatiran akan timbulnya masalah-masalah sosial lainnya seperti menjalarnya penyakit kelamin (HIV/AIDS), peredaran dan penggunaan narkoba, dan sebagainya.

Pelacuran ini akan menjadi masalah sosial yang semakin besar, apabila berkembang menjadi suatu profesi; terutama jika nilai-nilai moral dan keterlanjuran itu sudah semakin merasuk ke dalam jiwa para pelakunya;

terlebih lagi jika kemudian tertanam pula anggapan bahwa pekerjaan itu lebih mudah dilakukan dan tidak memerlukan keterampilan khusus (Abdulsyani, 2002). Anggapan bahwa pelacuran merupakan suatu profesi inilah yang kemudian memunculkan istilah wanita "Pekerja Seks Komersial (PSK)".

Kota Manado yang terus berkembang dengan pesat tidak terlepas dari masalah sosial ini (pelacuran atau PSK). Perkembangan lokasi-lokasi dunia hiburan yang begitu cepat di kota ini telah berdampak pada makin bertambahnya jumlah wanita PSK. Meskipun tidak ada data yang pasti tentang banyaknya PSK di kota ini, namun ada indikasi yang dapat menunjukkan jumlah yang cukup besar, dan bahkan ada kecenderungan meningkat seiring dengan semakin bertambahnya lokasi-lokasi dunia hiburan dan tempat-tempat atau lokasi-lokasi tertentu yang sengaja disediakan oleh pihak-

pihak tertentu. Abdulsyani (1999), mengemukakan bahwa masalah sosial adalah suatu kehidupan masyarakat yang sebelumnya normal menjadi terganggu, sebagai akibat dari perubahan pada unsur-unsur dan kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat antara lain seperti munculnya kegiatan prostitusi. Soekanto (2007), mengemukakan bahwa prostitusi merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapat upah.

Salah satu masalah yang sangat dikhawatirkan dari adanya PSK adalah penyebaran penyakit kelamin (HIV/ AIDS) yang dalam beberapa tahun terakhir ini cukup meresahkan warga Kota Manado. Kasus HIV/ AIDS di Kota Manado, pertama kali dilaporkan pada pertengahan tahun 1997 sebanyak 1 (satu) kasus, dan kemudian hingga tahun 1999 terdapat tiga kasus. Antara tahun 2000 sampai pertengahan tahun 2002 terjadi 6 kasus, kemudian pada tahun 2003 sebanyak 4 kasus, tahun 2004 sebanyak 15 kasus, tahun 2005 sebanyak 33 kasus, tahun 2006 sebanyak 34 kasus, tahun 2007 sebanyak 27 kasus, dan pada bulan Januari tahun 2008 sudah ada 8 kasus. Sehingga total kasus HIV/ AIDS di Kota Manado dari tahun 1997 sampai Januari 2008 sebanyak 127 kasus, dimana 23,12% penderita meninggal dunia. Dari sebanyak 127 kasus HIV/ AIDS tersebut sebanyak 14% ditemukan pada wanita PSK. Kemudian, faktor resiko infeksi HIV di Kota Manado sampai dengan Desember 2007 sebanyak 46,41% adalah pada faktor hubungan heteroseksual. (Anonimous, 2008).

Bertolak dari persoalan PSK dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan jumlah PSK tersebut, maka diperlukan penanganan yang efektif melalui program-program kebijakan yang tepat. Oleh karena itu diperlukan suatu studi ilmiah mengenai alternatif-alternatif kebijakan yang dipandang efektif dalam menangani masalah PSK di Kota Manado. Anderson (1984) mendefinisikan kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah.

Dari uraian latar belakang masalah di atas nampak bahwa keberadaan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan salah satu masalah sosial yang perlu penanganan secara efektif sehingga tidak menimbulkan masalah sosial lainnya yang meresahkan masyarakat umum. Jumlah PSK di Kota Manado yang relatif banyak dan terus meningkat pada akhir-akhir ini disinyalir merupakan sarana potensial penyebaran penyakit HIV/ AIDS yang pada akhir-akhir ini banyak meresahkan masyarakat karena kasusnya yang terus bertambah. Fenomena tersebut mendorong perlunya dilakukan kajian kebijakan yang efektif dalam menangani masalah PSK di Kota Manado. Dye (1996) mengemukakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya, dan kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. David Easton, (dalam Islamy, 1996) mengemukakan bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya termasuk mengatasi meluasnya pergerakan PSK.

Atas pertimbangan di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : "Alternatif-alternatif kebijakan yang bagaimanakah yang efektif dalam menangani masalah PSK di Kota Manado?".

Bertolak dari pertanyaan penelitian tersebut maka studi/ penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alternatif-alternatif kebijakan yang lebih efektif untuk dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Kota Manado dalam rangka penanganan masalah PSK di kota ini. Abdulsyani (2002), berpendapat bahwa masalah sosial adalah suatu kehidupan masyarakat yang sebelumnya normal menjadi terganggu, sebagai akibat dari perubahan pada unsur-unsur dan kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat.

Dengan kajian kebijakan tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi studi kajian kebijakan publik yang berkaitan dengan penanganan masalah atau penyakit sosial, khususnya masalah wanita PSK. Lebih

daripada itu, hasil kajian alternatif kebijakan ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran kepada pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Daerah Kota Manado untuk penanganan PSK melalui penyusunan atau pembuatan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dari awal bulan Juni sampai akhir bulan Agustus 2008. Lokasi penelitian yaitu tempat-tempat PSK beroperasi di Kota Manado, terdiri dari 7 (tujuh) Hotel, 22 (dua puluh dua) Pub/Cafe, 4 (empat) rumah tinggal, dan 3 (tiga) lokasi jalanan.

Penelitian ini dirancang sebagai suatu riset deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1989; Arikunto, 2000). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* atau pengambilan sampel bertujuan. Sampel responden diambil dari berbagai unsur terkait yaitu : (1) unsur pembuat dan pelaksana kebijakan, yaitu Dinas/Lembaga Pemerintah Daerah Kota Manado (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Sosial Sekretariat Daerah, dan DPRD); (2) unsur yang terkait dengan kegiatan/aktivitas PSK, yaitu PSK, geromo (mami), pengelola lokasi-lokasi beroperasinya PSK, dan pengguna jasa PSK; dan (3) unsur masyarakat, yaitu pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh wanita, tokoh pemuda dan akademisi.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), dibantu dengan teknik wawancara berstruktur dan tidak berstruktur, teknik observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara melakukan interpretasi terhadap data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris (Surachmad, 1987).

Selanjutnya untuk melakukan analisis alternatif kebijakan, maka teknik penilaian alternatif kebijakan yang digunakan adalah *Franklin Method* dan *Equivalent Alternatif Method*. Metode dan kriteria seleksi tersebut digunakan sebagai usaha untuk memilih dan mengevaluasi alternatif kebijakan mana sebagai alternatif kebijakan yang direkomendasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan Penanganan Masalah PSK Kota Manado

1. Identifikasi dan Perumusan Masalah Kebijakan

Berdasarkan identifikasi permasalahan PSK yang diperoleh melalui penelitian ini, maka substansi masalah kebijakan yang memerlukan aksi kebijakan (*policy action*) atau serangkaian tindakan dari pemerintah Daerah Kota Manado adalah sebagai berikut :

- a) Masalah pengendalian perkembangan/pertumbuhan PSK, baik dalam pengertian pengurangan jumlah PSK yang sudah ada, maupun dalam pengertian pencegahan terhadap munculnya atau tumbuhnya PSK baru.
- b) Masalah pengawasan terhadap PSK untuk mencegah penularan HIV/ AIDS baik dari kalangan PSK kepada orang lain, atau pun dari orang lain kepada PSK yang kemudian menular kepada orang lain.

2. Identifikasi dan Analisis Alternatif Kebijakan

Dengan menggunakan ketiga bentuk metode peramalan alternatif kebijakan, maka ditetapkan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah kebijakan yang telah dirumuskan diatas, yaitu sebagai berikut :

- a) Kebijakan lokalisasi PSK.
- b) Kebijakan perbaikan kondisi ekonomi PSK.
- c) Kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap PSK.

Kriteria pokok yang digunakan dalam penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan tersebut adalah "sampai seberapa

jauh alternatif itu dapat dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak sehingga menghasilkan dampak yang positif". Kriteria ini tidak hanya mempunyai konotasi bahwa pemilihan alternatif kebijakan itu mempunyai resiko tenaga, biaya, dan waktu, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah bahwa alternatif yang dipilih itu dapat benar-benar berfungsi dengan baik (pragmatis) dan dapat memecahkan masalah kebijakan dengan baik.

a. Program Lokalisasi PSK. Terdapat beberapa manfaat atau pun dampak positif dengan memilih lokalisasi PSK sebagai alternatif kebijakan pemecahan masalah PSK, baik dari sisi pemerintah, PSK itu sendiri, dan masyarakat umum, antara lain :

- 1) Dari sisi pemerintah sebagai aktor utama pembuat kebijakan akan dapat diperoleh manfaat : a) memudahkan untuk melakukan pengawasan serta pembinaan (bimbingan dan penyuluhan) kepada PSK; b) memudahkan untuk mendeteksi sedini mungkin masalah-masalah yang muncul dari aktivitas PSK terutama penularan dan penyebaran virus HIV dan penyakit AIDS dari dan kepada PSK; c) selain itu, adanya lokalisasi PSK juga memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan PAD.
- 2) Dari sisi PSK, kebijakan lokalisasi akan memberikan beberapa manfaat dan dampak positif seperti : a) terjaminnya keamanan dari tindakan-tindakan pihak lain terutama dari para pemakai, dan para perantara (Germo/ Mami) serta orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan, pemerasan, perlakuan tidak manusiawi, dan ancaman keselamatan jiwa; b) memudahkan PSK mendapatkan bimbingan dan penyuluhan ataupun bantuan dari pihak-pihak terkait terutama dari pemerintah daerah; dan c) menjamin kesehatan bagi PSK terutama mencegah dari terinfeksi virus HIV/ AIDS.
- 3) Dari sisi pengguna PSK, kebijakan lokalisasi akan memberikan manfaat dan dampak positif terutama jaminan

terhindarnya dari terinfeksi penyakit HIV/ AIDS, serta jaminan keamanan.

- 4) Dari sisi masyarakat umum, kebijakan lokalisasi akan mengurangi rasa kekhawatiran meluasnya penyebaran virus HIV/ AIDS.

Walaupun banyak manfaat dan dampak positif yang dapat diperoleh dari lokalisasi PSK, namun para *stakeholders* yang diwawancarai nampaknya tidak setuju bila alternatif ini dipilih untuk mengatasi masalah PSK dan berbagai permasalahan yang ditimbulkannya.

b. Program Perbaikan Kondisi Ekonomi PSK

Upaya perbaikan kondisi ekonomi PSK merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan permasalahan PSK dan berbagai masalah lain yang ditimbulkannya. Hal ini terutama mengingat motif atau alasan utama sebagian PSK memilih atau melakukan profesi tersebut adalah karena desakan kondisi ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil analisa data maka, tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi para PSK terutama adalah : a) mengusahakan/menyediakan pekerjaan lain yang produktif bagi PSK. b) memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan tertentu kepada PSK sehingga mereka dapat memasuki lapangan kerja disektor publik ataupun dapat melakukan usaha-usaha produktif secara mandiri. Alternatif kebijakan tersebut apabila dapat dilaksanakan secara baik oleh pemerintah daerah akan dapat memberikan dampak positif, seperti dapat menekan atau mengurangi jumlah PSK serta dapat meminimalkan berbagai permasalahan yang timbul dari aktivitas PSK tersebut. Walaupun demikian, berbagai *stakeholders* yang diwawancarai umumnya kurang/tidak yakin atau pesimis kalau alternatif kebijakan tersebut dapat segera dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam waktu yang dekat,

c. Program Pengawasan dan Pembinaan PSK

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa masalah yang paling banyak dihubungkan dengan aktivitas PSK adalah masalah

HIV/AIDS. Penyebaran atau penularan HIV/AIDS paling banyak melalui hubungan seksual dengan orang yang mengidap HIV, baik melalui hubungan heteroseksual (hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan) maupun hubungan homoseksual (hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki). Di daerah-daerah dengan cara penularan HIV melalui hubungan heteroseksual terbanyak, angka kejadian infeksi HIV tertinggi ditemukan pada golongan wanita pelacur (WTS), selanjutnya pada laki-laki yang seringkali berhubungan dengan WTS (DepKes-RI, 1997). Resiko infeksi HIV di Kota Manado sampai dengan Januari 2008 menunjukkan 46,41% ada pada hubungan heteroseksual, 28,25% karena hubungan homoseksual, 7,6% parenteral, dan 17,44% tidak diketahui. Kemudian, dari 127 kasus HIV/AIDS (s/d Januari 2008), sebanyak 56% adalah laki-laki, dan 44% pada perempuan di mana 13% diantaranya adalah PSK. Laki-laki yang terinfeksi HIV/AIDS tersebut umumnya adalah yang sering melakukan hubungan seksual dengan WTS/PSK (Anonymous, 2008).

Berangkat dari beberapa fakta di atas, kebijakan pengawasan dan pembinaan kepada PSK sangat penting dilakukan secara efektif. Hal ini sesuai hasil wawancara ditanggapi positif oleh berbagai *stakeholders* yang merupakan responden dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil kajian pustaka/teoritis, maupun hasil analisis data wawancara dan observasi, bahwa program pengawasan dan pembinaan PSK merupakan tindakan yang efektif untuk mencegah meluasnya penyebaran HIV dan penyakit AIDS melalui PSK.

B. Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanganan Masalah PSK Kota Manado

Setelah dilakukan perbandingan ketiga alternatif kebijakan tersebut baik prediksi hasil, dampak, dan konsekuensi-konsekuensinya maka diperoleh kesimpulan: Pertama, program lokalisasi PSK walaupun dinilai efektif, namun agaknya sulit atau tidak

bisa dilakukan karena tidak akan diterima (ditolak) oleh masyarakat - sehingga diprediksikan tidak akan memberikan hasil dan dampak yang diharapkan. Kedua, program perbaikan ekonomi PSK juga dinilai efektif untuk mengatasi masalah PSK dan berbagai masalah yang ditimbulkannya, namun agaknya sulit dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam waktu yang dekat karena memerlukan sumberdaya yang besar dan prasyarat yang kompleks. Ketiga, program pengawasan dan pembinaan PSK dinilai lebih efektif dan lebih mudah melaksanakannya, serta mendesak untuk segera dilakukan dengan lebih efektif dalam rangka menanggulangi masalah meluasnya atau meningkatkan kasus HIV/AIDS di Kota Manado pada akhir-akhir ini yang disinyalir banyak hubungannya dengan aktivitas PSK.

Atas pertimbangan argumen-argumen dari masing-masing alternatif kebijakan tersebut maka alternatif kebijakan yang direkomendasikan dari hasil penelitian ini dalam rangka penanganan masalah PSK Kota Manado adalah "program pengawasan dan pembinaan PSK". Dalam rangka itu, maka hal-hal yang direkomendasikan kepada pengambil keputusan kebijakan untuk dilakukan atau lebih diintensifkan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah melalui Dinas-dinas terkait, terutama Dinas Kesehatan, perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas bimbingan dan penyuluhan kepada PSK.
- 2) Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan perlu menyediakan klinik khusus bagi PSK.
- 3) Pemerintah daerah perlu menetapkan suatu peraturan yang mewajibkan PSK memeriksakan kesehatan secara berkala di rumah sakit, klinik, laboratorium atau dokter yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- 4) Promosi dan penyediaan kondom bagi kalangan PSK. Secara medis penggunaan kondom dalam hubungan seksual dapat mencegah kontak langsung antara dinding anus, vagina atau penis atau dinding mulut dengan cairan sperma, cairan vagina, dan

penis atau dinding mulut dengan rahim (servik) atau darah (Anonimous, 1994).

- 5) Pembinaan mental-spiritual kepada PSK juga perlu dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada PSK untuk kembali hidup normal.
- 6) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan kepada PSK perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kerja kepada PSK.
- 7) Koordinasi antara lembaga atau dinas-dinas pemerintahan daerah yang terkait sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pengawasan dan pembinaan PSK.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis kebijakan yang dilakukan, diperoleh 3 (tiga) alternatif kebijakan untuk menangani atau mengatasi masalah PSK di Kota Manado, yaitu :
 - a. Program Lokalisasi PSK. Program ini dinilai sangat efektif untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dari aktivitas PSK terutama masalah penyebaran HIV/AIDS yang terus meningkat di Kota Manado; akan tetapi nampaknya sulit atau tidak bisa dilakukan karena tidak akan diterima (ditolak) oleh masyarakat luas, dengan alasan atau pertimbangan utama bahwa lokalisasi tidak tepat dilakukan di Kota Manado yang masyarakatnya terkenal sangat religius.
 - b. Program perbaikan kondisi ekonomi PSK dalam rangka mengurangi jumlah PSK. Program ini dinilai efektif karena motif utama dari sebagian besar PSK melakukan profesi ini disebabkan oleh faktor tekanan ekonomi keluarga yang semakin sulit. Walaupun demikian, program ini agak sulit dapat dilaksanakan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah dalam waktu dekat karena harus mempersiapkan sumber-sumber daya dan biaya yang besar;

sementara masalah yang timbul dari PSK mendesak untuk segera ditangani.

- c. Program pengawasan dan pembinaan PSK. Program ini dinilai efektif untuk mengatasi masalah PSK yang mendesak segera ditangani yaitu mengatasi meluasnya penyebaran HIV dan penyakit AIDS. Program ini dinilai efektif karena selain lebih mudah melaksanakannya, juga akan mendapat dukungan dari masyarakat luas.
 2. Berdasarkan analisis ketiga alternatif kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan atau memperbandingkan dampak dan konsekuensi-konsekuensi dari masing-masing alternatif tersebut melalui metode peramalan, maka penelitian ini merekomendasikan alternatif kebijakan yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam rangka mengatasi PSK dan masalah yang ditimbulkannya adalah "program pengawasan dan pembinaan PSK". Agar program kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif maka perlu ditetapkan-dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA).
- ### B. Saran
- Bertolak dari hasil temuan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut :
1. Diperlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk mengatasi masalah PSK di Kota Manado.
 2. Dalam melaksanakan program kebijakan pengawasan dan pembinaan PSK perlu adanya koordinasi dan kerja sama dari lembaga atau dinas-dinas pemerintah daerah terkait, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja kebijakan.
 3. Pemerintah daerah juga perlu melakukan kerjasama dengan unsur-unsur dalam masyarakat dalam melaksanakan program kebijakan pengawasan dan pembinaan PSK.
 4. Perlu dibentuk suatu tim terpadu dalam melaksanakan program pengawasan dan

pembinaan PSK yang melibatkan komponen-komponen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2008, *Situasi HIV/ AIDS Manado s/d Januari 2008*, Dinas Kesehatan Kota Manado.
- Abdulsyani, 1999, *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, Gunung Agung, Jakarta.
- _____, 2002, *Sosiologi : Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Anderson, J. E., 1984, *Cases in Public Policy Making*, Preager Publishers, New York.
- Arikunto, S., 2000, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dye, R. T., 1996, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Islamy, I, M., 1996, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, M, dan Effendy S., 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, S., 2007, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, CV Rajawali, Jakarta.
- Surakhmat, W, 1987, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung.